KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah Jamin Tak Lemahkan KPK
Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

REVISI UU KUHP

Pemerintah Jamin Tak Lemahkan KPK

JAKARTA – Pemerintah menjamin revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) tidak melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, hal yang dipergunjingkan dalam revisi KUHP itu adalah masuknya lima delik pidana khusus. Kelima delik itu adalah korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, dan pencucian uang.

"Nah, sangkaan orang, undang-undang (UU) khusus yang mengatur tindakan khusus itu mandul habis tidak berlaku, padahal tidak," tandas Wiranto di Jakarta kemarin.

Menurut Wiranto, masuknya delik-delik pidana khusus ke dalam revisi KUHP itu sifatnya hanya melengkapi. Melengkapi pada saat dilaksanakan konsolidasi hukum atau modifikasi dan integrasi hukum. Apa yang diatur adalah hal pokoknya saja. Untuk *lex specialis* atau hukum yang bersifat khusus tetap masuk dalam UU yang sudah ada, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Narkotika.



WIRANTO
Menko Polhukam

"Karena ini mengatur *lex generalis*, hanya hal pokok saja. Tapi hal khusus atau *lex spesialis* -nya itu masuk pada UU yang sudah ada termasuk UU Tipikor dan UU Narkotika, itu enggak habis. Jadi tidak dihapus, masih berlaku, badannya masih tetap, proses peradilan tetap, tidak diubah justru diperkuat karena ada *lex generalis*-nya di KUHP. Ini jangan dipelintir," paparnya.

Wiranto juga meminta agar hal-hal tersebut jangan dipelintir sedemikian rupa sehingga membingungkan masyarakat. Dia mengaku heran ketika ada gerakan yang menolak pelemahan KPK dari revisi KUHP. "Bahkan ada upaya yang menghentikan bagaimana perumusan ini diundangkan. Ya janganlah, KUHP ini peninggalan Belanda," ujarnya.

Dalam waktu dekat Wiranto berencana mengundang para pemangku kepentingan yang terkait dengan revisi KUHP. Di antaranya KPK, Panja DPR, BNN, dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama membicarakan hal tersebut. "Kita diskusikan dengan satu keterbukaan, satu argumentasi hukum yang sahih sehingga tidak menjebak masyarakat dalam ketidaktahuan dan kesimpangsiuran," tandasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima surat dari KPK terkait revisi KUHP. Dia menegaskan bahwa KPK harus diperkuat. "Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana," tandasnya.

Terkait hal-hal apa saja yang akan diperkuat, Presiden belum menjelaskannya. Sebab saat ini masih dilakukan kajian yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. "Setelah selesai, saya sampaikan. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," paparnya.

● binti mufarida/ dita angga